

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara menghadapi tantangan serupa dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Isu ini bersifat kompleks dan masih menjadi hambatan di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum, kemiskinan mencerminkan rendahnya kualitas hidup yang ditandai oleh keterbatasan dalam berbagai aspek, baik bersifat material maupun non-material. Kondisi tersebut mencakup kurangnya akses terhadap pangan, gizi yang memadai, pendidikan, informasi, serta kebutuhan dasar lainnya yang belum dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, mulai dari kondisi individu dan keluarga, hingga situasi di lingkungan komunitas. Pendidikan yang rendah dan keterbatasan pendapatan merupakan penyebab utamanya. Selain itu, aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga berkontribusi dalam memperparah situasi ini, menjadikan kemiskinan sebagai tantangan besar yang tidak mudah diselesaikan (Priseptian & Primandhana, 2022).

Terdapat tiga faktor utama dalam aspek ekonomi yang mendorong munculnya kemiskinan. Pertama, ketimpangan dalam distribusi sumber daya menjadi penyebab dominan yang memicu ketidaksetaraan dalam pendapatan. Ketika kekayaan serta peluang ekonomi tidak terbagi secara adil, sebagian kelompok masyarakat akan terus mengalami keterbelakangan.

Kedua, individu yang hidup dalam garis kemiskinan umumnya hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan pendapatan. Keadaan ini bisa diperburuk oleh diskriminasi, kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai, bahkan kondisi sosial turun-temurun yang membuat mereka sulit keluar dari siklus kemiskinan. Ketiga, kesenjangan dalam penguasaan dan akses terhadap modal juga memperparah situasi tersebut. Tanpa adanya dukungan modal yang cukup, individu atau kelompok sulit untuk memulai usaha maupun meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi tiga tipe utama, yaitu: (1) kemiskinan natural, yang timbul akibat terbatasnya sumber daya alam dan pengaruh eksternal seperti bencana alam; (2) kemiskinan kultural, yang disebabkan oleh cara pandang serta kebiasaan hidup yang tidak mendukung perubahan kesejahteraan; dan (3) kemiskinan struktural, yang berasal dari ketimpangan dalam sistem dan kebijakan yang tidak mendukung masyarakat miskin (Ardian et al., 2021).

Kemiskinan dapat terjadi secara natural sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya, baik berupa alam, tenaga manusia, maupun infrastruktur penunjang. Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ini kerap terperangkap dalam siklus kemiskinan meskipun telah ikut serta dalam proses pembangunan, karena keterbatasan tersebut membatasi hasil yang dapat mereka raih. Selain itu, faktor luar seperti bencana alam, penyakit kronis, atau usia lanjut juga bisa menjadi pemicu yang menghambat kemampuan individu untuk bekerja dan mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan kultural berkaitan

dengan gaya hidup dan kebiasaan yang terbentuk oleh budaya, di mana sebagian orang merasa puas dengan keadaan yang ada dan kurang terdorong untuk memperbaiki kualitas hidup. Hal ini membuat mereka bersikap pasif, kurang kreatif, cenderung boros, dan tidak menggunakan bantuan dengan efektif. Di sisi lain, kemiskinan struktural muncul sebagai akibat dari ketimpangan kebijakan ekonomi, distribusi alat produksi yang tidak merata, serta maraknya korupsi dan kolusi dalam sistem pemerintahan. Dominasi sistem ekonomi global yang hanya menguntungkan pihak tertentu juga memperparah ketimpangan tersebut. Kemiskinan jenis ini sering tidak terlihat langsung karena berasal dari sistem dan kebijakan yang justru memperburuk kondisi kelompok rentan. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika program-program yang bertujuan membantu masyarakat miskin tidak dijalankan secara optimal, sehingga akses terhadap kesempatan dan sumber daya tetap tidak merata.

Kemiskinan merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang bersifat multidimensi, mencakup beragam aspek dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, persoalan ini tetap menjadi tantangan yang signifikan. Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah partisipasi angkatan kerja, yakni proporsi penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang tengah mencari pekerjaan. Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan terjadi saat individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Ketika akses

terhadap pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan pokok terbatas, maka kemiskinan cenderung meningkat. Seseorang digolongkan miskin apabila rata-rata pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis ini dihitung berdasarkan kebutuhan minimum konsumsi makanan sekitar 2.100 kalori per orang per hari, ditambah kebutuhan non-makanan seperti perumahan, pakaian, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Surabaya, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar dan paling maju di Indonesia. Kota ini memainkan peran sentral dalam sektor perdagangan, pendidikan, dan industri di kawasan timur Indonesia. Selain menjadi pusat ekonomi, Surabaya juga menyimpan nilai historis yang tinggi, terutama karena keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan, seperti yang tergambar dalam peristiwa-peristiwa heroik melawan kolonialisme. Dalam dunia perdagangan dan logistik, Pelabuhan Tanjung Perak. Salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia menjadi infrastruktur vital yang mendukung roda perekonomian kota. Beragam sektor industri tumbuh pesat di sini, mulai dari manufaktur hingga jasa. Namun, Surabaya tak hanya dikenal lewat geliat industrinya. Kota ini juga menyimpan kekayaan budaya dan warisan sejarah yang bisa dijumpai melalui museum, situs peninggalan sejarah, hingga festival budaya yang rutin diselenggarakan. Beberapa landmark yang menjadi ciri khas kota ini antara lain Jembatan Suramadu, Monumen Kapal Selam, dan Tugu Pahlawan. Dalam bidang pendidikan, Surabaya menempati posisi strategis sebagai pusat akademik dengan keberadaan universitas unggulan seperti Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Walaupun pertumbuhan

ekonominya relatif positif, persoalan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Surabaya memang lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Timur, namun masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan kebijakan lebih lanjut.

Malang yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai "Kota Pendidikan" karena banyaknya lembaga pendidikan unggulan yang menjadikannya pusat akademik penting di Indonesia. Selain itu, Malang juga menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur, karena menawarkan perpaduan antara panorama alam, kekayaan budaya, dan nilai sejarah yang kuat. Pertumbuhan ekonomi kota ini ditopang oleh tiga sektor utama: pendidikan, pariwisata, dan pertanian. Apel Malang merupakan salah satu komoditas khas yang identik dengan kota ini, dikenal luas karena rasa dan kualitasnya. Di sisi lain, Malang juga memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, seperti Candi Singosari, Jatim Park, dan Museum Malang Tempo Doeloe. Beragam acara budaya dan festival seni kerap diselenggarakan, menambah nilai daya tarik kota ini sebagai tujuan rekreasi. Dengan cuaca yang relatif sejuk dan udara yang segar, kota ini menjadi tempat yang ideal bagi wisatawan yang ingin merasakan nuansa pegunungan. Meskipun angka kemiskinan di Malang telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mengatasi permasalahan ini masih diperlukan, khususnya bagi masyarakat prasejahtera dan penduduk di kawasan pinggiran yang belum sepenuhnya mendapat akses terhadap peluang ekonomi dan fasilitas sosial yang memadai.

Kota Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal dengan julukannya sebagai Kota Gadis, akronim dari *Perdagangan, Pendidikan, dan Industri*. Lokasinya yang strategis di antara jalur utama penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadikan Madiun sebagai kota transit yang penting serta pusat aktivitas perdagangan kawasan. Kota ini juga memiliki identitas khas lewat kuliner legendaris seperti pecel Madiun, dan sejarahnya yang kuat dalam dunia perkeretaapian, karena memiliki salah satu depo kereta api terbesar di Indonesia. Seiring waktu, Madiun terus berkembang menjadi kota yang tertata dan layak huni, ditandai dengan pertumbuhan infrastruktur, kawasan industri, serta kemajuan di bidang layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin mendukung kualitas hidup warganya. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mengurangi masalah sosial ekonomi, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses sarana dan prasarana di wilayah pedesaan serta kurangnya kesempatan kerja yang merata. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih inklusif.

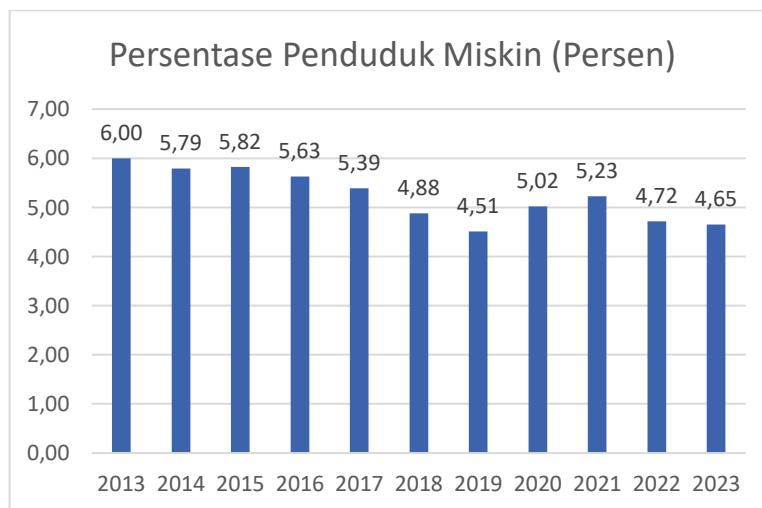
Kota Pasuruan yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berada di kawasan timur wilayah metropolitan Gerbangkertosusila dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasuruan. Meskipun wilayah administrasinya tidak terlalu luas, kota ini memiliki letak geografis yang strategis di jalur utama penghubung antara Surabaya dan Banyuwangi. Pasuruan dikenal sebagai salah satu sentra industri dan perdagangan di kawasan tersebut, dengan sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak utama ekonominya. Di samping itu, kota ini memiliki pelabuhan berskala kecil yang

mendukung kegiatan logistik tingkat regional. Dari sisi sosial, tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan menunjukkan tren yang bervariasi dari tahun ke tahun, namun secara umum mengalami penurunan berkat upaya pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran sektor industri dan pelaku UMKM juga turut mendorong dinamika ekonomi lokal. Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dikenal luas sebagai destinasi wisata pegunungan dengan panorama alam yang memesona. Sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Malang, Kota Batu memperoleh status sebagai daerah otonom pada tahun 2001. Berada di ketinggian antara 700 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, kota ini memiliki iklim yang sejuk dan menyegarkan, sangat mendukung untuk kegiatan pertanian serta pengembangan pariwisata. Dikenal pula dengan sebutan “Kota Apel,” Batu memiliki produksi apel yang melimpah dan telah menjadi salah satu ciri khas daerah tersebut. Beragam tempat wisata seperti taman rekreasi, wisata alam, agrowisata, hingga destinasi edukatif turut menjadikan kota ini favorit di kalangan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Kota Batu kini memegang peranan penting dalam kemajuan wilayah Malang Raya, sekaligus berkontribusi besar terhadap penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini adalah gambaran persentase penduduk miskin di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu:

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya

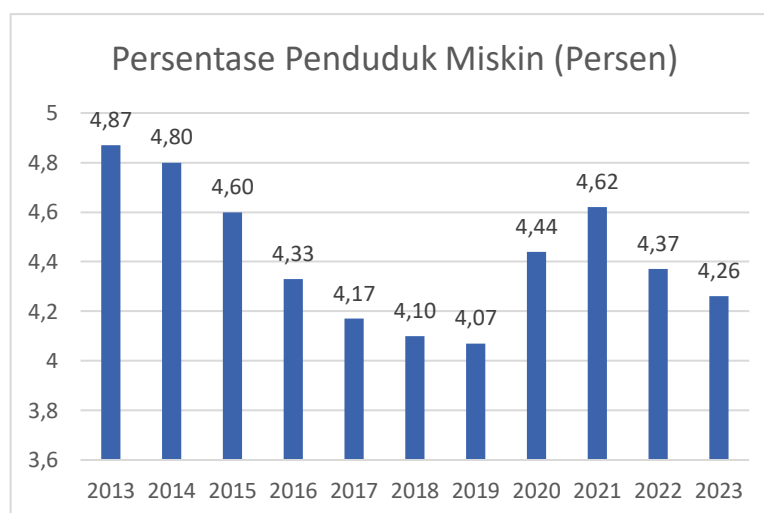


Sumber: BPS Kota Surabaya (data diolah)

Grafik yang disajikan memperlihatkan dinamika tingkat kemiskinan di Kota Surabaya selama kurun waktu 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, terlihat adanya pola penurunan yang relatif stabil dalam persentase jumlah penduduk miskin, meskipun terdapat lonjakan pada beberapa tahun tertentu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,00%, dan kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai level terendah sebesar 4,51% pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan program pengurangan kemiskinan. Namun demikian, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat menjadi 5,02% dan 5,23%. Setelah situasi

pandemi mulai membaik, tren penurunan kembali berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka masing-masing 4,72% dan 4,65%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara jangka panjang Surabaya berhasil menekan tingkat kemiskinan, gangguan ekonomi global seperti pandemi tetap memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan di Kota Malang

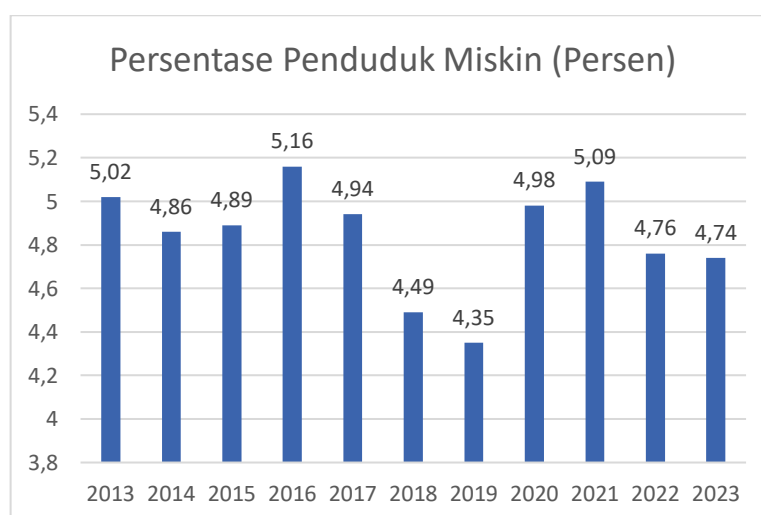


Sumber: BPS Kota Malang (data diolah)

Grafik mengenai tingkat kemiskinan di Kota Malang selama periode 2013 hingga 2023 memperlihatkan kecenderungan menurun secara konsisten, meskipun sempat mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,87%, dan secara bertahap mengalami penurunan hampir setiap tahun hingga mencapai 4,07% pada 2019. Tren penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi serta perbaikan pelayanan sosial. Akan tetapi, pandemi yang melanda pada tahun 2020 dan 2021 berdampak pada naiknya angka kemiskinan menjadi masing-

masing 4,44% dan 4,62%, sebagai akibat dari terganggunya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor informal dan jasa. Kondisi mulai menunjukkan pemulihan di tahun-tahun berikutnya, ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,37% pada 2022 dan 4,26% pada 2023. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Malang memiliki kapasitas yang cukup kuat dalam mengatasi kemiskinan, meskipun masih menghadapi tantangan dari faktor eksternal seperti pandemi.

Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Kota Madiun

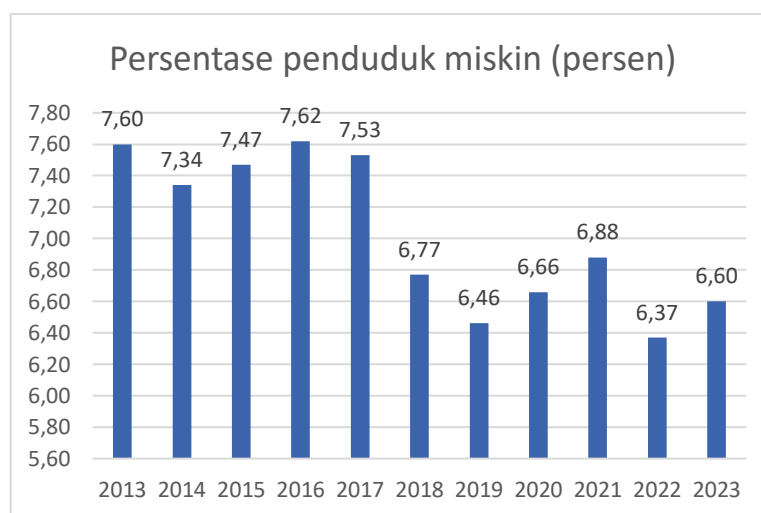


Sumber: BPS Kota Madiun (data diolah)

Grafik tersebut menggambarkan perubahan persentase penduduk miskin di Kota Madiun selama kurun waktu 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di kota ini menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 5,02%, kemudian menurun sedikit menjadi 4,86% pada tahun berikutnya. Namun, tren tersebut tidak bertahan lama, karena angka kemiskinan naik hingga mencapai titik tertinggi 5,16% pada 2016. Setelah itu, terjadi

penurunan secara bertahap hingga mencapai 4,35% pada 2019, yang mencerminkan perbaikan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 dan 2021 berdampak signifikan, menyebabkan lonjakan angka kemiskinan menjadi 4,98% dan 5,09%. Seiring dengan membaiknya kondisi pascapandemi, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 4,76% pada 2022 dan sedikit lebih rendah lagi menjadi 4,74% di tahun 2023. Perkembangan ini menunjukkan adanya proses pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Madiun dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan di Kota Pasuruan

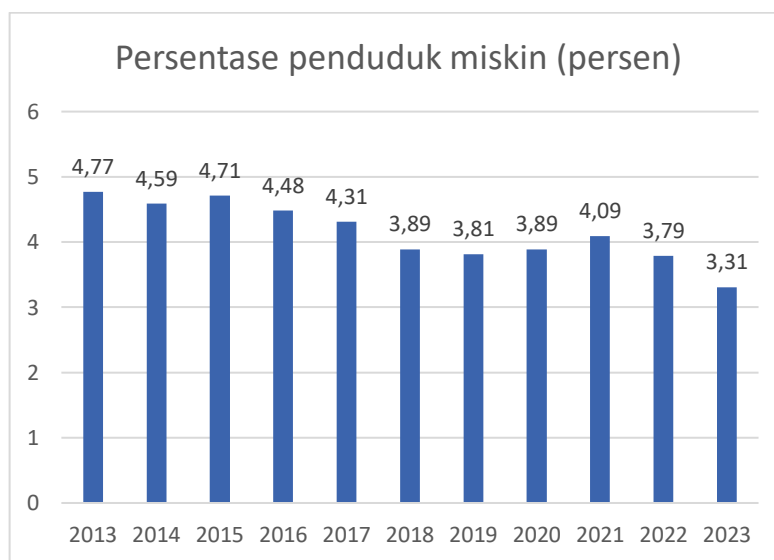


Sumber: BPS Kota Pasuruan (data diolah)

Grafik yang menggambarkan tingkat kemiskinan di Kota Pasuruan selama rentang waktu 2013 hingga 2023 memperlihatkan pola yang berfluktuasi, meskipun dalam jangka panjang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 7,60% dan sempat turun menjadi 7,34% pada 2014. Namun, pada 2016 terjadi peningkatan hingga mencapai puncaknya di angka 7,62%. Setelah itu, kondisi mulai membaik

dengan penurunan signifikan hingga mencapai 6,46% pada 2019, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi lokal serta akses masyarakat terhadap layanan dan kebutuhan dasar. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 memicu kenaikan kembali menjadi 6,66% dan 6,88%, yang terutama disebabkan oleh gangguan di sektor informal dan usaha kecil. Pada 2022, terjadi perbaikan dengan penurunan angka menjadi 6,37%, meskipun tahun berikutnya, yaitu 2023, sedikit meningkat menjadi 6,60%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi selama periode tersebut, arah umumnya menunjukkan bahwa Kota Pasuruan secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan, meski tetap dihadapkan pada tantangan kestabilan saat terjadi krisis ekonomi.

Gambar 1.5 Tingkat Kemiskinan di Kota Batu



Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Grafik yang menampilkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Batu sepanjang tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, meskipun terdapat sedikit fluktuasi akibat perubahan kondisi

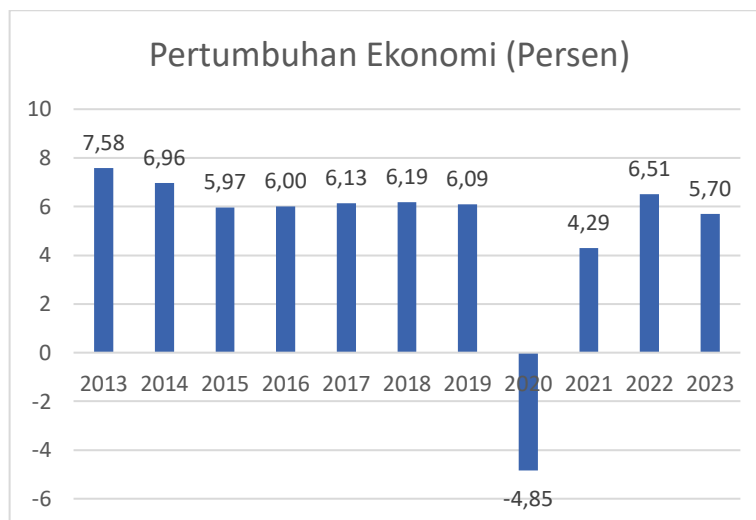
ekonomi. Pada tahun 2013, angka kemiskinan tercatat sebesar 4,77% dan terus menurun secara bertahap hingga mencapai 4,31% pada 2017. Penurunan ini menunjukkan adanya pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Penurunan berlanjut pada 2018 dan 2019 hingga mencapai 3,81%, sebelum pandemi COVID-19 memicu kenaikan sementara menjadi 3,89% di 2020 dan 4,09% pada 2021. Namun, situasi mulai membaik pada 2022 dengan angka kemiskinan turun menjadi 3,79%, dan pada 2023 berhasil ditekan lebih jauh hingga 3,31%, angka terendah dalam satu dekade terakhir. Secara keseluruhan, Kota Batu menunjukkan kinerja yang positif dalam mengurangi kemiskinan, terutama setelah pandemi, melalui pemulihan ekonomi dan penguatan sektor-sektor produktif masyarakat.

Menurut Riswanto et al., 2023 Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas dalam suatu perekonomian yang menghasilkan penambahan output barang dan jasa di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, mencatat pertumbuhan yang stabil dan cukup tinggi, yang secara konsisten mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini didorong oleh perkembangan sektor perdagangan, jasa, serta industri kreatif yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kota Malang, yang dikenal sebagai kota pendidikan dan

tujuan wisata, juga menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Sektor jasa dan UMKM menjadi tulang punggung utama yang berperan dalam menekan tingkat kemiskinan secara perlahan namun berkelanjutan. Sementara itu, Kota Madiun, meskipun memiliki kapasitas ekonomi yang lebih kecil, tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil, didorong oleh sektor jasa, perdagangan, dan transportasi. Kontribusi sektor-sektor ini turut membantu menurunkan kemiskinan, meskipun pandemi sempat menyebabkan kenaikan angka kemiskinan dalam waktu singkat. Pemulihan ekonomi pascapandemi menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki potensi untuk kembali menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap. Di sisi lain, Kota Pasuruan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, terutama pada sektor industri dan perdagangan lokal. Namun demikian, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih tertinggal dibandingkan dengan Surabaya dan Malang, yang menandakan masih adanya persoalan dalam hal distribusi hasil pembangunan. Kota Batu, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata dan pertanian, mengalami peningkatan ekonomi signifikan terutama setelah tahun 2015. Meski demikian, pandemi COVID-19 sempat menghentikan tren positif ini dan berdampak pada kenaikan sementara tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, kelima kota memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi masing-masing daerah, tingkat ketimpangan yang ada, serta sejauh mana kebijakan sosial dari pemerintah daerah mampu menjangkau kelompok rentan secara optimal (Noviatamara et al., 2019). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS),

berikut adalah gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu:

Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya

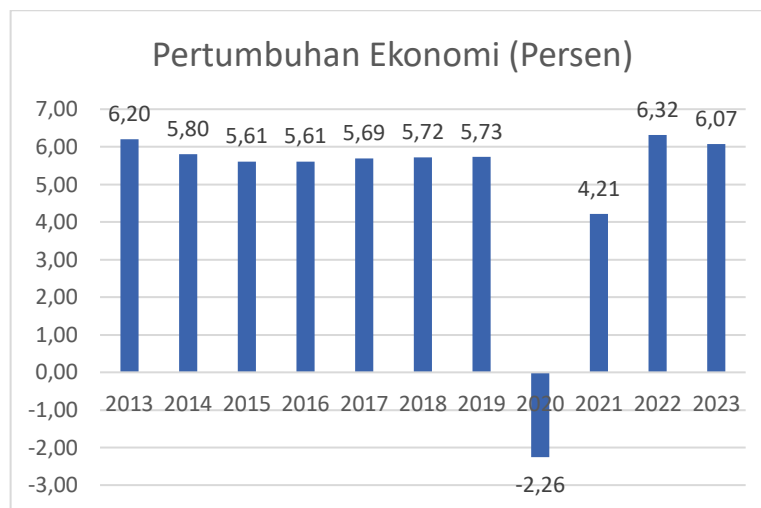


Sumber: BPS Kota Surabaya (data diolah)

Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selama periode 2013 hingga 2023 memperlihatkan adanya dinamika yang cukup mencolok. Di awal periode, tingkat pertumbuhan tergolong tinggi, mencapai 7,58% pada 2013 dan sedikit menurun menjadi 6,96% pada 2014. Memasuki tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dalam kisaran 5,97% hingga 6,19%. Situasi berubah drastis pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda, menyebabkan kontraksi ekonomi hingga -4,85% akibat terganggunya aktivitas di berbagai sektor. Kendati demikian, pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,29%, lalu meningkat signifikan menjadi 6,51% pada 2022, meskipun kembali mengalami penurunan ringan menjadi 5,70% pada 2023. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bagaimana ekonomi

Surabaya mengalami tekanan akibat krisis global, namun juga menunjukkan kapasitas pemulihan yang cukup kuat setelah pandemi mereda.

Gambar 1.7 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang

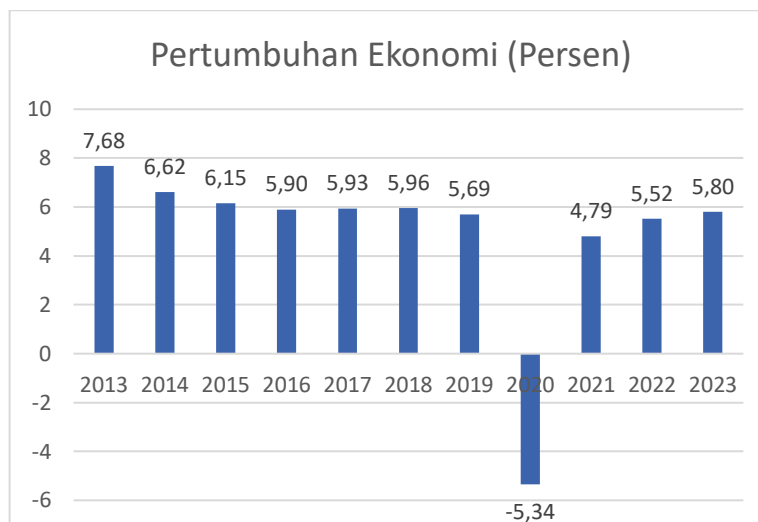


Sumber: BPS Kota Malang (data diolah)

Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Malang selama periode 2013 hingga 2023 memperlihatkan kecenderungan yang cukup stabil dengan fluktuasi ringan, hingga terjadi penurunan tajam pada tahun 2020. Dari 2013 hingga 2019, laju pertumbuhan berada di kisaran 5,61% hingga 6,20%, mencerminkan stabilitas kondisi ekonomi daerah. Namun, tahun 2020 menjadi titik balik akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi secara signifikan, dengan angka pertumbuhan merosot hingga -2,26%. Setelah periode tersebut, ekonomi Kota Malang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan pertumbuhan mencapai 4,21% pada 2021, lalu melonjak menjadi 6,32% di tahun 2022, dan sedikit melandai menjadi 6,07% pada 2023. Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan ketangguhan ekonomi

Kota Malang dalam menghadapi tekanan pandemi dan kemampuannya untuk pulih secara bertahap dalam waktu yang relatif singkat.

Gambar 1.8 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun

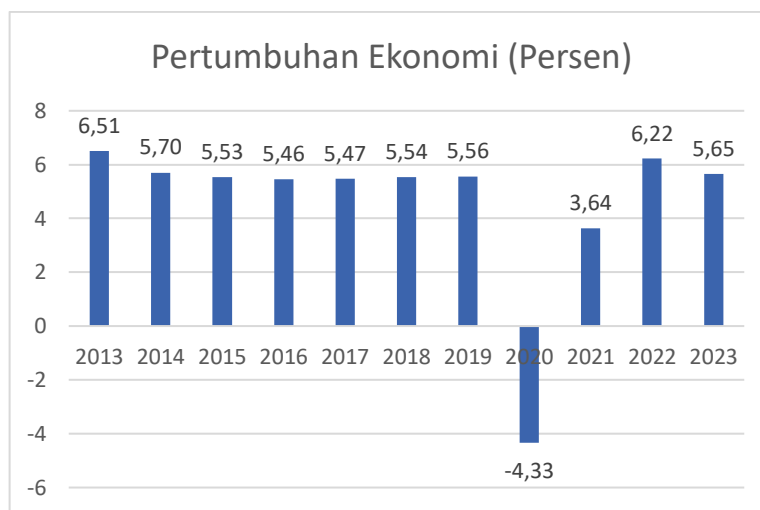


Sumber: BPS Kota Madiun (data diolah)

Grafik ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dari tahun 2013 hingga 2023. Pada awal periode, tepatnya tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di angka 7,68%. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya terjadi penurunan secara bertahap hingga mencapai 5,69% pada 2019, mencerminkan adanya perlambatan meskipun perekonomian tetap tumbuh. Situasi berubah drastis pada 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi tajam dengan pertumbuhan ekonomi menurun ke -5,34%. Hal ini menunjukkan dampak besar dari pembatasan aktivitas serta penurunan kinerja di berbagai sektor usaha. Seiring dengan membaiknya kondisi, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif 4,79% pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 5,52% pada 2022 dan 5,8% pada 2023. Secara keseluruhan, data ini

mencerminkan bahwa meskipun sempat menghadapi tekanan berat akibat pandemi, Kota Madiun mampu bangkit dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan.

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pasuruan

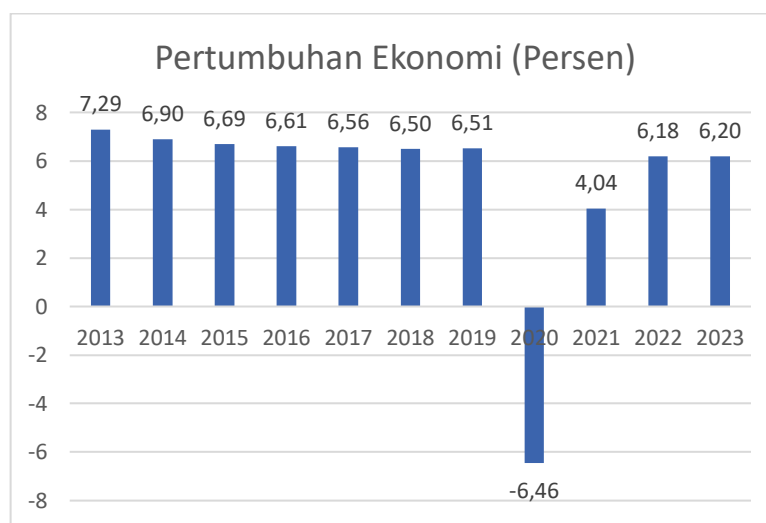


Sumber: BPS Kota Pasuruan (data diolah)

Grafik yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan sepanjang tahun 2013 hingga 2023 menampilkan tren yang cenderung stabil sebelum terganggu oleh pandemi COVID-19. Selama periode 2013 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,46% hingga 6,51%, mencerminkan kestabilan kondisi ekonomi meskipun terdapat sedikit variasi dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020, pandemi menyebabkan perlambatan tajam dengan pertumbuhan ekonomi menurun drastis menjadi -4,33%, menandai terjadinya kontraksi ekonomi akibat terganggunya berbagai sektor usaha. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 3,64%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 6,22% pada 2022. Di tahun 2023, pertumbuhan sedikit terkoreksi ke angka 5,65%,

menandakan proses pemulihan yang mulai menstabil. Secara umum, grafik ini mencerminkan bahwa meskipun sempat terdampak cukup dalam, Kota Pasuruan menunjukkan kemampuan untuk bangkit dan menata kembali pertumbuhan ekonominya secara bertahap.

Gambar 1.10 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu



Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Batu selama tahun 2013 hingga 2023 memperlihatkan tren yang relatif stabil pada kisaran 6% hingga 7% sebelum terjadi gangguan akibat pandemi. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi, dimulai dari 7,29% pada tahun 2013 dan tetap berada di kisaran antara 6,50% hingga 6,90% pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pada 2020, pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan yang menyebabkan penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi hingga menyentuh angka -6,46%, menjadi titik terendah sepanjang periode tersebut. Setelah pandemi mulai terkendali, perekonomian Kota Batu mulai mengalami pemulihan bertahap, dengan pertumbuhan sebesar 4,04% pada

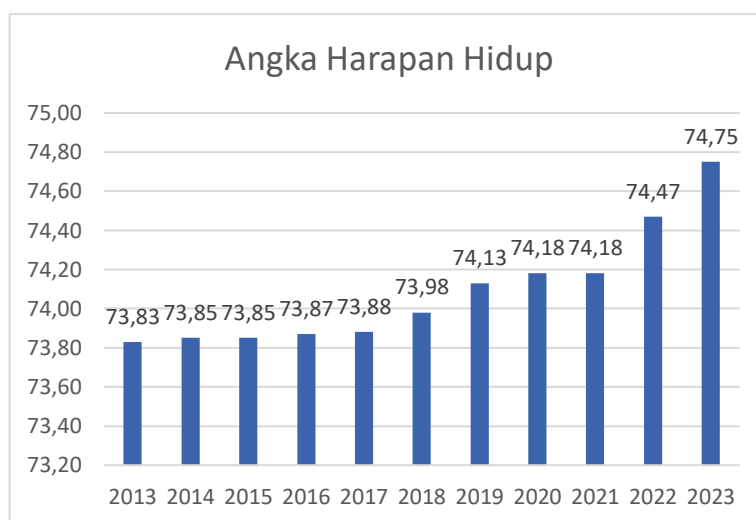
2021, meningkat ke 6,18% pada 2022, dan naik sedikit menjadi 6,20% pada 2023. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki kemampuan pemulihan ekonomi yang cukup kuat, meskipun sempat mengalami tekanan berat akibat krisis global.

Upaya pengentasan kemiskinan sangat berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi pula produktivitas tenaga kerja, baik secara langsung melalui peningkatan kapasitas fisik, maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas hidup. Kondisi kesehatan yang buruk, terutama pada anak-anak, dapat memengaruhi kehadiran mereka di sekolah, meningkatkan risiko ketidakhadiran, dan menurunkan daya konsentrasi dalam belajar. Dampak jangka panjangnya, hal ini bisa menghambat kelulusan tepat waktu dan mengurangi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, seperti posisi manajerial, jika dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sehat. Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk mengukur kemajuan sektor kesehatan di kota-kota seperti Surabaya, Malang, Madiun, Pasuruan, dan Batu yang di dalamnya mencakup komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap warga negara memiliki hak atas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, AHH bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Susanti, 2020).

Menurut (Anggraini & Lisyarningsih, 2013), Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah mencerminkan bahwa pembangunan di sektor

kesehatan belum mencapai hasil yang optimal. Sebaliknya, semakin tinggi Angka Harapan Hidup, maka semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini gambaran angka harapan hidup di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu:

Gambar 1.11 Angka Harapan Hidup Di Kota Surabaya

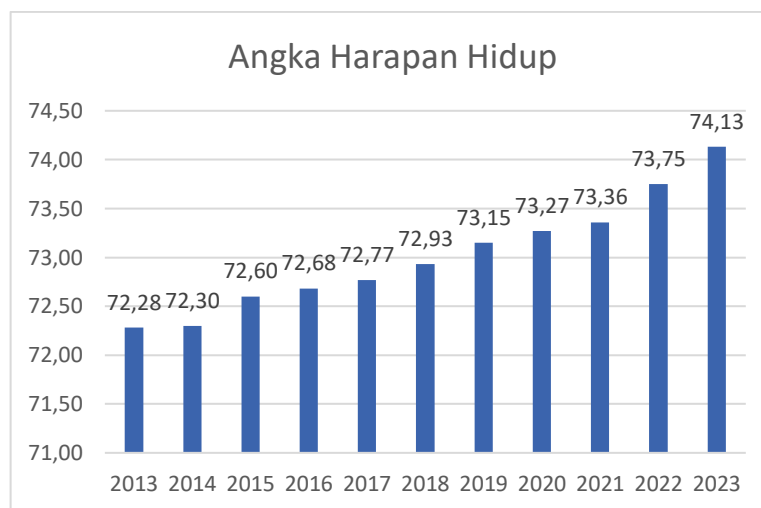


Sumber: BPS Kota Surabaya (data diolah)

Grafik di atas memperlihatkan angka harapan hidup di Kota Surabaya selama periode 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, angka harapan hidup di kota ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2013, angka harapan hidup tercatat sebesar 73,83 tahun dan relatif stabil dalam kisaran 73,85 hingga 73,88 selama beberapa tahun berikutnya hingga 2017. Mulai 2018, peningkatan mulai terlihat lebih nyata dengan angka harapan hidup mencapai 73,98 tahun dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74,13 tahun pada 2019. Tren positif ini terus berlanjut secara konsisten hingga tahun 2023, yang mencatat angka harapan hidup tertinggi selama periode tersebut,

yakni sebesar 74,75 tahun. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, dan layanan publik di Kota Surabaya, yang secara bertahap mendorong peningkatan kualitas hidup warganya.

Gambar 1.12 Angka Harapan Hidup Di Kota Malang

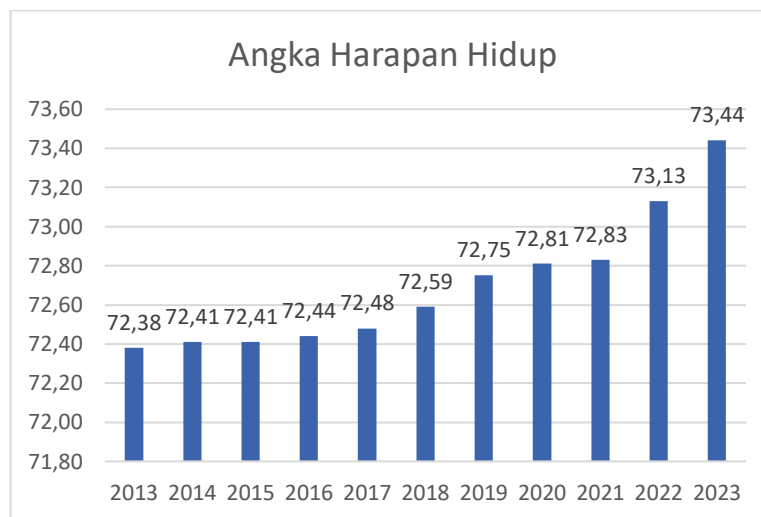


Sumber: BPS Kota Malang (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan angka harapan hidup di Kota Malang selama rentang waktu 2013 hingga 2023. Secara umum, angka harapan hidup di kota ini mengalami tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Pada 2013, angka tersebut berada di angka 72,28 tahun dan terus naik secara bertahap hingga mencapai 72,93 tahun pada 2018. Setelah itu, kenaikan berlanjut dengan laju yang lebih stabil, dari 73,15 tahun pada 2019 menjadi 73,27 tahun pada 2020, lalu sedikit meningkat menjadi 73,36 tahun pada 2021. Pada tahun 2022, angka ini kembali naik menjadi 73,75 dan akhirnya mencapai angka tertinggi selama periode tersebut, yakni 74,13 tahun pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup, layanan kesehatan yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat yang terus

diperbaiki, sehingga mendorong peningkatan umur harapan hidup di Kota Malang secara berkelanjutan.

Gambar 1.13 Angka Harapan Hidup Di Kota Madiun

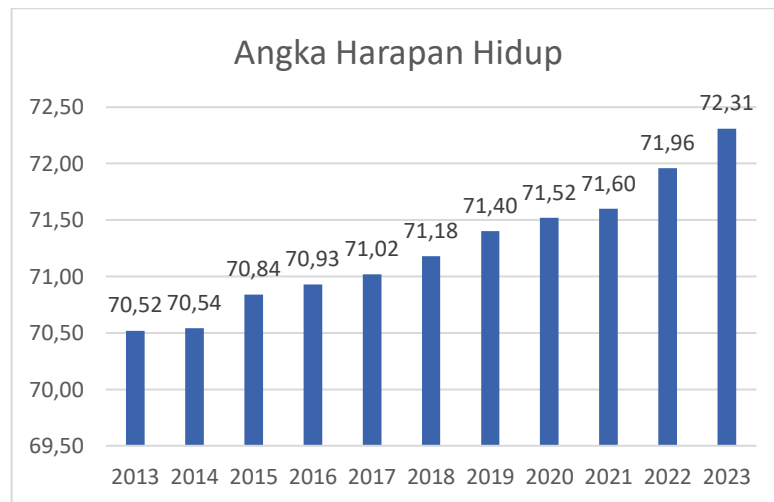


Sumber: BPS Kota Madiun (data diolah)

Grafik tersebut memperlihatkan angka harapan hidup di Kota Madiun selama periode 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, angka harapan hidup di kota ini mengalami peningkatan yang konsisten, meskipun laju pertumbuhannya berlangsung secara bertahap. Pada tahun 2013, angka harapan hidup berada di angka 72,38 tahun dan relatif stabil di kisaran 72,41 hingga 72,44 pada kurun waktu 2014 hingga 2016. Kenaikan perlahan terjadi pada 2017 dengan angka mencapai 72,48, dan terus meningkat menjadi 72,75 pada 2019. Tren positif ini berlanjut dengan angka 72,81 pada 2020, naik sedikit ke 72,83 pada 2021. Peningkatan yang lebih mencolok terlihat pada dua tahun terakhir, yakni mencapai 73,13 pada 2022 dan menyentuh titik tertinggi sebesar 73,44 pada 2023. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup di Kota Madiun, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan,

kesejahteraan sosial, dan kondisi lingkungan yang mendukung masyarakat untuk hidup lebih sehat dan lebih lama.

Gambar 1.14 Angka Harapan Hidup Di Kota Pasuruan

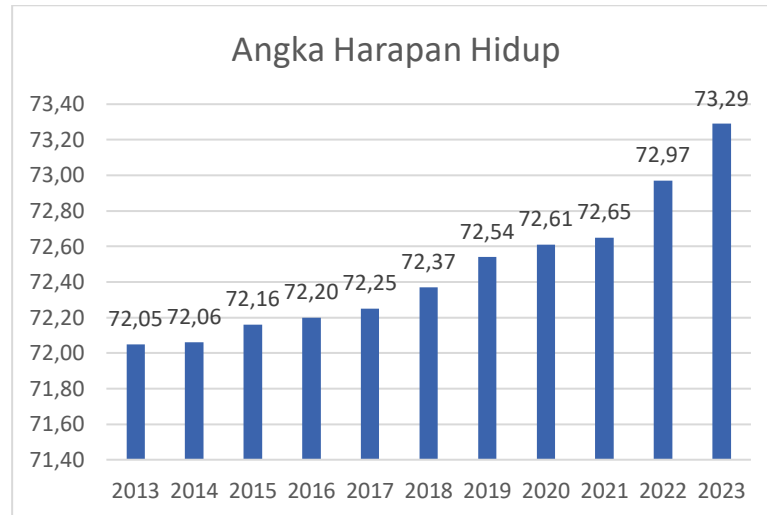


Sumber: BPS Kota Pasuruan (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan bagaimana angka harapan hidup di Kota Pasuruan berkembang selama periode 2013 hingga 2023. Secara umum, angka ini mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, angka harapan hidup tercatat sebesar 70,52 tahun dan sedikit naik menjadi 70,54 tahun pada 2014. Selanjutnya, terjadi kenaikan yang lebih stabil, dimulai dari 70,84 tahun pada 2015 hingga mencapai 71,18 tahun pada 2018. Tren kenaikan terus berlanjut meskipun dalam laju yang relatif lambat, dari 71,40 tahun pada 2019 menjadi 71,60 tahun di tahun 2021. Peningkatan yang lebih mencolok terjadi pada dua tahun terakhir, yakni mencapai 71,96 tahun pada 2022 dan kemudian menyentuh angka tertinggi sebesar 72,31 tahun pada 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan dalam layanan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta akses terhadap fasilitas kesehatan

di Kota Pasuruan yang secara keseluruhan mendukung peningkatan umur harapan hidup penduduknya.

Gambar 1.15 Angka Harapan Hidup Di Kota Batu



Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

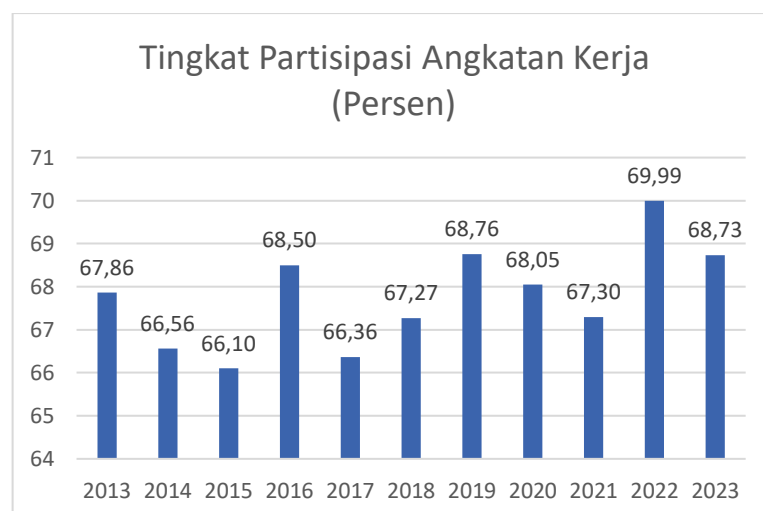
Grafik tersebut menggambarkan pertumbuhan angka harapan hidup di Kota Batu selama periode 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, terlihat adanya tren peningkatan yang stabil dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Pada 2013, angka harapan hidup berada di angka 72,05 tahun dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 72,06 tahun di tahun berikutnya. Setelah itu, angka ini terus meningkat perlahan, dari 72,16 tahun pada 2015 menjadi 72,25 tahun pada 2017. Kenaikan yang lebih nyata mulai terlihat pada 2018 dengan angka mencapai 72,37, lalu terus bertambah secara bertahap hingga menyentuh 72,65 tahun pada 2021. Dua tahun terakhir mencatat lonjakan yang lebih besar, yaitu 72,97 tahun pada 2022 dan puncaknya sebesar 73,29 tahun pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam bidang pelayanan kesehatan, kualitas hidup, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Batu,

yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap usia harapan hidup yang lebih panjang dan kondisi hidup yang lebih sehat.

Angkatan kerja menurut Desmawan et al., 2023 merupakan keseluruhan jumlah tenaga kerja dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu, yang terdiri dari individu yang sedang bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau sudah tidak aktif bekerja lagi tidak termasuk dalam kategori ini. Penduduk usia kerja yang untuk sementara waktu tidak bekerja tetapi memiliki pekerjaan tetap juga digolongkan ke dalam angkatan kerja. Selama periode 2013 hingga 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Di Kota Surabaya, TPAK cenderung tinggi dan stabil, mencerminkan keterlibatan aktif penduduk usia produktif dalam pasar kerja. Namun demikian, tingginya TPAK belum tentu sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, mengingat sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal dengan pendapatan rendah. Kota Malang menunjukkan tren peningkatan TPAK, seiring dengan berkembangnya sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata. Akan tetapi, penurunan kemiskinan di kota ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pekerjaan daripada jumlah angkatan kerja itu sendiri. Di Kota Madiun, TPAK relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Namun, seperti kota lain, tingginya partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, terutama jika sebagian besar pekerjaan tidak menjamin

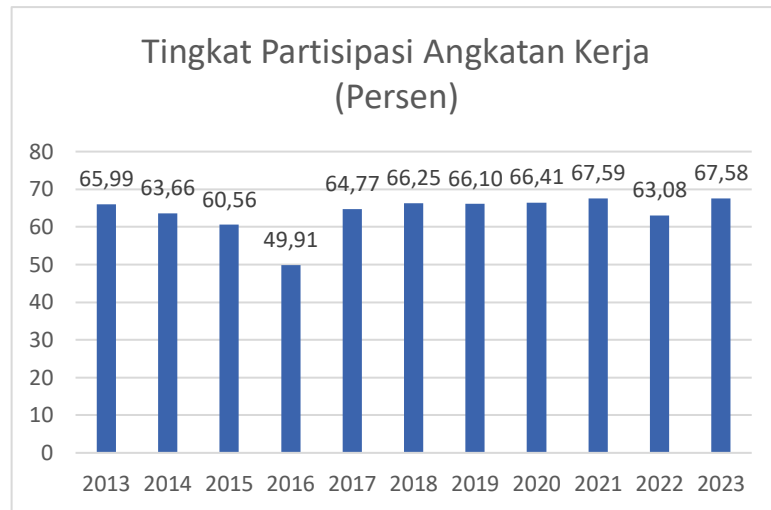
penghasilan yang layak atau jaminan sosial. Kota Pasuruan mengalami TPAK yang cenderung fluktuatif, dan meskipun banyak warga yang termasuk dalam angkatan kerja, tingkat kemiskinan tetap tinggi pada beberapa tahun karena masih terbatasnya pekerjaan produktif dan dominasi sektor informal. Sedangkan di Kota Batu, yang ekonominya didukung oleh sektor pariwisata dan pertanian, TPAK tergolong tinggi. Akan tetapi, kemiskinan di kota ini sangat dipengaruhi oleh kestabilan sektor pariwisata, yang sempat terpuruk selama pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, meskipun TPAK yang tinggi menunjukkan potensi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dampak nyatanya sangat bergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia, besaran upah, dan adanya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di masing-masing kota (Todaro, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu:

Gambar 1.16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Surabaya



Sumber: BPS Kota Surabaya (data diolah)

Grafik yang ditampilkan menggambarkan perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Surabaya selama periode 2013 hingga 2023 yang menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal periode, yaitu tahun 2013, TPAK tercatat sebesar 67,86%, namun angka ini mengalami penurunan secara bertahap hingga menyentuh titik terendah sebesar 66,10% pada tahun 2015. Kondisi ini kemudian membaik di tahun 2016 dengan kenaikan signifikan ke angka 68,50%, meski kembali menurun ke 66,36% pada 2017. Tren peningkatan kembali terjadi pada tahun 2018 dan 2019, di mana tingkat partisipasi meningkat hingga 68,76%. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, partisipasi sedikit menurun menjadi 68,05% dan kembali turun ke 67,30% pada 2021. Meski begitu, tanda-tanda pemulihan mulai tampak di 2022 dengan lonjakan TPAK mencapai 69,99%, yang merupakan angka tertinggi dalam rentang waktu tersebut, meskipun sedikit turun menjadi 68,73% pada 2023. Secara umum, grafik ini mencerminkan fluktuasi partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, krisis kesehatan global, serta menunjukkan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Gambar 1.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Malang

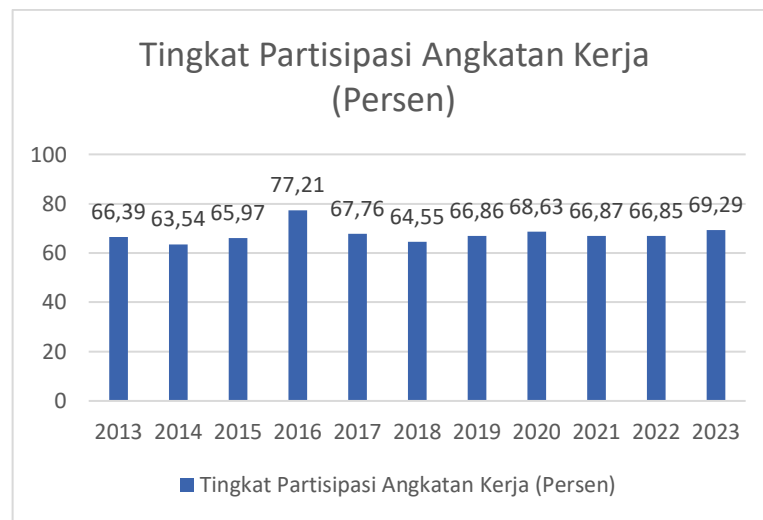
Sumber: BPS Kota Malang (data diolah)

Grafik yang menggambarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Malang selama periode 2013 hingga 2023 menunjukkan pola yang cukup fluktuatif dengan variasi yang mencolok di beberapa tahun. Pada awal periode, yakni antara tahun 2013 hingga 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja berada dalam kisaran 60% hingga 65% dan tergolong stabil. Namun, pada 2016 terjadi penurunan tajam hingga mendekati 50%, yang menjadi titik terendah selama satu dekade tersebut. Setelah itu, tren kembali positif, di mana TPAK meningkat secara signifikan dari 2017 hingga 2019 dan mencapai sekitar 65% hingga 67%. Meskipun pandemi COVID-19 melanda pada 2020, tingkat partisipasi tetap bertahan di kisaran 66% hingga 67%, bahkan naik menjadi sekitar 68% pada 2021. Tahun 2022 mencatat penurunan sementara ke kisaran 62%, namun terjadi lonjakan kembali pada 2023, dengan angka partisipasi mencapai level tertinggi selama periode ini, yakni hampir 69%. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja

di Kota Malang yang sempat mengalami tekanan di pertengahan dekade, namun mampu menunjukkan pemulihan yang kuat di tahun-tahun berikutnya.

Gambar 1.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota

Madiun

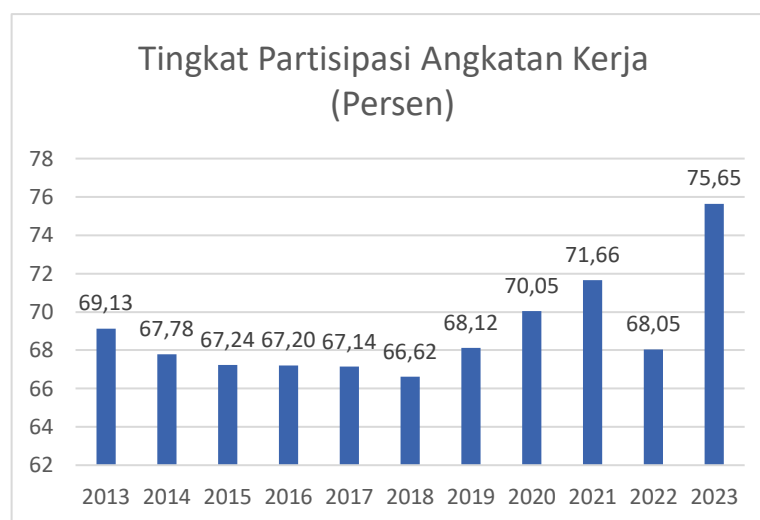


Sumber: BPS Kota Madiun (data diolah)

Grafik tersebut menampilkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun dalam rentang waktu 2013 hingga 2023. Secara keseluruhan, TPAK di kota ini mengalami fluktuasi sepanjang periode tersebut. Pada 2013, TPAK tercatat sebesar 66,39%, kemudian menurun ke titik terendahnya pada 2014 dengan angka 63,54%. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada 2016, di mana TPAK melonjak hingga mencapai 77,21%, menjadi yang tertinggi selama satu dekade terakhir. Setelah puncak tersebut, angka TPAK kembali turun dan bergerak fluktuatif, namun relatif stabil dalam kisaran 64% hingga 68%. Menariknya, pada 2020 meskipun situasi pandemi melanda angka partisipasi justru meningkat menjadi 68,63%, dan terus mengalami sedikit peningkatan dalam dua tahun berikutnya.

Pada 2023, TPAK mencapai 69,29%, yang mencerminkan semakin tingginya keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja, serta menggambarkan adanya proses pemulihan ekonomi dan bertambahnya peluang kerja di Kota Madiun.

**Gambar 1.19 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota
Pasuruan**

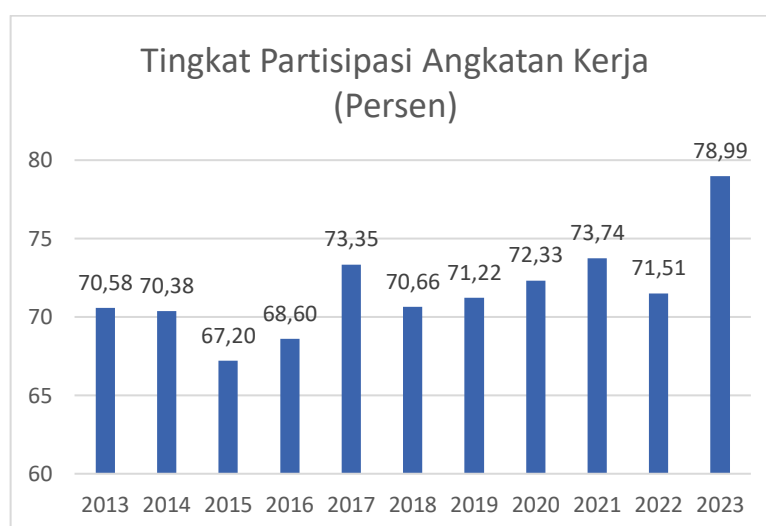


Sumber: BPS Kota Pasuruan (data diolah)

Grafik yang disajikan memperlihatkan dinamika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pasuruan sepanjang tahun 2013 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan menurun di awal periode dan peningkatan tajam di tahun-tahun terakhir. Pada 2013, TPAK tercatat sebesar 69,13%, namun perlahan menurun dan mencapai titik terendah pada 2018 dengan angka 66,62%. Mulai tahun 2019, kondisi mulai membaik dengan kenaikan partisipasi menjadi 68,12%, dan kemudian melonjak ke 70,05% pada tahun 2020 meskipun berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Tren peningkatan ini berlanjut di 2021, saat TPAK naik

menjadi 71,66%, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2022 ke angka 68,05%. Puncak partisipasi tercapai pada 2023, saat TPAK mencatatkan angka tertinggi dalam satu dekade, yaitu 75,65%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kondisi ketenagakerjaan di Kota Pasuruan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Gambar 1.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Batu



Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Grafik yang disajikan memperlihatkan dinamika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Batu sepanjang periode 2013 hingga 2023. Secara umum, terlihat adanya pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat menjelang akhir periode. Pada dua tahun awal, yakni 2013 dan 2014, partisipasi tenaga kerja cenderung stabil di kisaran 70%. Namun, pada 2015 terjadi penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah sebesar 67,2%. Memasuki tahun 2016, TPAK mulai menunjukkan tren pemulihan dengan kenaikan menjadi 68,60%, dan pada 2017 mengalami lonjakan tajam

hingga 73,35%. Setelah sedikit menurun ke 70,66% pada 2018, tren positif kembali berlanjut dengan kenaikan menjadi 71,22% di 2019 dan 72,33% di tahun 2020. Kenaikan ini berlanjut pada 2021 dengan capaian 73,74%, meskipun kembali mengalami penurunan kecil menjadi 71,51% pada 2022. Peningkatan paling mencolok terjadi pada 2023, di mana TPAK mencapai angka tertinggi selama satu dekade terakhir, yakni 78,99%. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan dalam keterlibatan penduduk Kota Batu dalam pasar tenaga kerja. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses terhadap lapangan pekerjaan serta meningkatnya peran aktif masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu aspek penting yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Masalah pengangguran menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk mengukur kondisi ini, tersedia sejumlah indikator yang dapat digunakan sebagai alat analisis. Meningkatnya angka pengangguran umumnya dipicu oleh keterbatasan lapangan kerja serta minimnya kesempatan kerja yang tersedia, yang pada gilirannya turut memperburuk kondisi kemiskinan. TPT berfungsi sebagai indikator krusial untuk mengidentifikasi persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil terserap oleh pasar kerja.

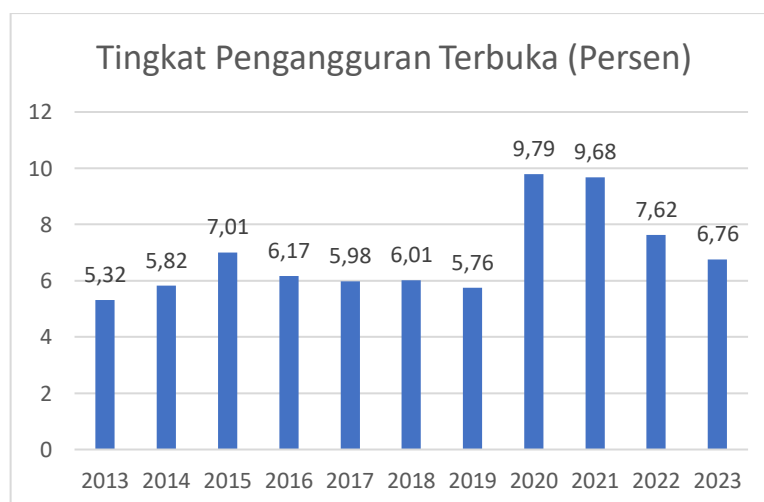
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengacu pada penduduk usia produktif yang sedang berupaya mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Secara umum, pengangguran diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu pengangguran

terbuka, setengah menganggur (semi-terbuka), dan pengangguran terselubung. Berbagai faktor dapat memicu meningkatnya TPT, antara lain terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja, minimnya akses terhadap informasi lowongan pekerjaan, ketimpangan distribusi pekerjaan antarwilayah, kurang optimalnya pelaksanaan program pelatihan dari pemerintah, serta lemahnya motivasi individu dalam mencari pekerjaan (Dieda Genesis Azzahra et al., 2022).

Selama rentang waktu 2013 hingga 2023, terlihat adanya keterkaitan yang cukup kuat antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di lima kota utama Jawa Timur, yakni Surabaya, Malang, Madiun, Pasuruan, dan Batu. Meski pengaruhnya tidak seragam di setiap kota, pola hubungan tersebut tetap konsisten. Di Surabaya, sebagai pusat aktivitas ekonomi provinsi, TPT cenderung stabil. Namun demikian, tingkat pengangguran tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kemiskinan, terutama di kalangan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Berbeda halnya dengan Kota Malang, di mana fluktuasi TPT lebih sering terjadi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum berhasil masuk ke sektor pekerjaan formal. Akibatnya, risiko kemiskinan pun meningkat, khususnya di kalangan usia muda produktif. Sementara itu, Kota Madiun menunjukkan dinamika tersendiri. Meski memiliki skala ekonomi yang lebih kecil dibanding kota lainnya, TPT di wilayah ini relatif terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan sepanjang periode tersebut. Namun demikian, keterbatasan jumlah lapangan kerja berkualitas dan dominasi sektor jasa skala kecil menjadikan sebagian

angkatan kerja bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu, yang turut menyumbang pada potensi kemiskinan laten. Di Kota Pasuruan, tantangan semakin nyata karena angka TPT cenderung lebih tinggi dibanding kota lain, dengan minimnya lapangan kerja formal mendorong banyak penduduk masuk ke sektor informal, yang berimplikasi pada rendahnya kestabilan pendapatan. Sementara itu, Kota Batu menunjukkan TPT yang relatif lebih rendah, namun karakteristik musiman dari sektor dominan seperti pariwisata dan pertanian menjadikan sebagian warga rentan terhadap bentuk pengangguran terselubung dan ketidakpastian penghasilan. Secara keseluruhan, di kelima kota memperlihatkan bahwa TPT memiliki korelasi positif terhadap kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang layak, berkelanjutan, dan merata sebagai upaya efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu:

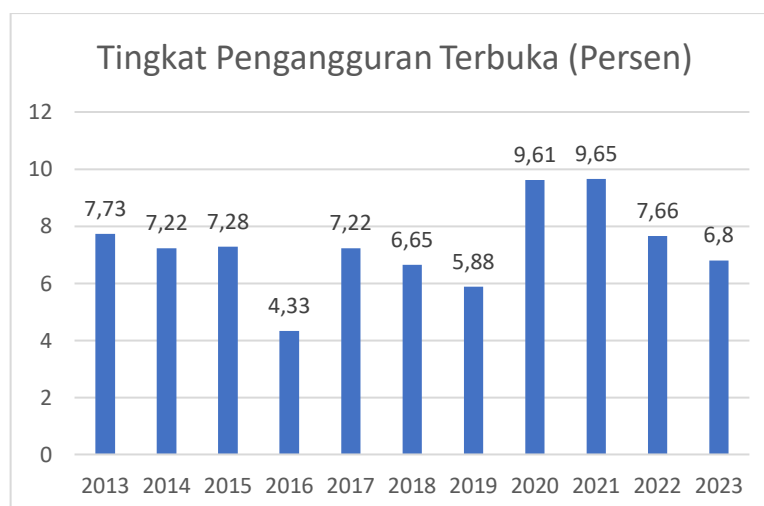
Gambar 1.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Surabaya



Sumber: BPS Kota Surabaya (data diolah)

Grafik tersebut memperlihatkan fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya sepanjang periode 2013 hingga 2023. Secara umum, pola yang terbentuk menunjukkan adanya pergerakan naik turun dari tahun ke tahun. Pada awal periode, tepatnya tahun 2013, tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,32%, lalu mengalami peningkatan hingga mencapai 7,01% pada 2015. Setelah itu, tren menurun mulai terlihat secara bertahap, dan pada 2019, TPT mencapai titik terendah sebesar 5,76%. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2020, saat angka pengangguran melonjak tajam menjadi 9,79%. Kenaikan ini sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengguncang sektor ketenagakerjaan secara luas. Meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 9,68% pada 2021, angkanya masih tergolong tinggi. Baru pada tahun 2022 dan 2023, Surabaya mulai menunjukkan pemulihan, dengan tingkat pengangguran menurun masing-masing menjadi 7,62% dan 6,76%. Penurunan ini mencerminkan proses perbaikan ekonomi dan mulai pulihnya pasar kerja di kota tersebut.

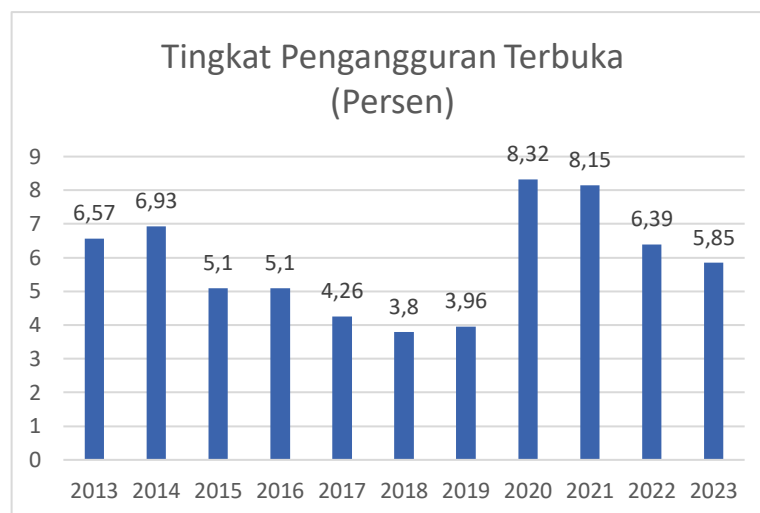
Gambar 1.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Malang



Sumber: BPS Kota Malang (data diolah)

Grafik di atas memperlihatkan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Malang selama periode 2013 hingga 2023. Pada tahun 2013, TPT tercatat sebesar 7,73% dan tetap berada di sekitar angka 7% hingga 2015, menunjukkan stabilitas dalam pasar tenaga kerja saat itu. Tahun 2016 menjadi titik penting dengan penurunan tajam TPT ke angka 4,33%, mencerminkan peningkatan kondisi ketenagakerjaan yang cukup signifikan. Namun, tren ini tidak bertahan lama, karena pada 2017 TPT kembali meningkat menjadi 7,22% dan terus berfluktuasi hingga turun ke 5,88% pada 2019.

Pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 dan 2021 memberikan dampak besar terhadap pasar kerja, ditunjukkan dengan lonjakan angka pengangguran menjadi 9,61% dan 9,65% pada dua tahun tersebut. Meski demikian, sejak 2022 terlihat tanda-tanda pemulihan, dengan TPT menurun menjadi 7,66% dan kembali turun menjadi 6,8% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Kota Malang akibat pandemi, serta proses pemulihan yang secara bertahap mulai memperbaiki kondisi ketenagakerjaan.

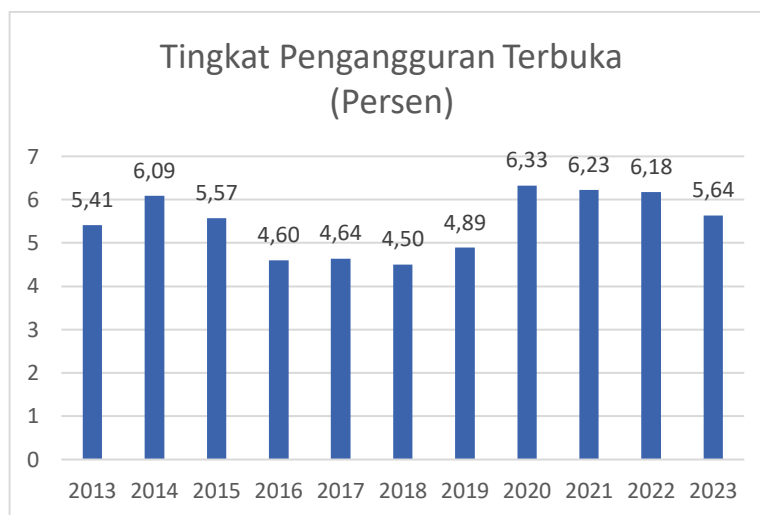
Gambar 1.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Madiun

Sumber: BPS Kota Madiun (data diolah)

Grafik yang ditampilkan menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun sepanjang tahun 2013 hingga 2023. Pada awal periode, angka pengangguran tergolong cukup tinggi, dimulai dari 6,57% pada 2013 dan meningkat menjadi 6,93% di tahun berikutnya. Setelah itu, terjadi penurunan secara bertahap hingga mencapai titik terendah sebesar 3,8% pada 2018, yang mengindikasikan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, krisis akibat pandemi COVID-19 pada 2020 mengakibatkan lonjakan pengangguran yang signifikan, di mana TPT naik menjadi 8,32% sebagai akibat dari terganggunya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja. Pada 2021, meskipun sedikit menurun, angka tersebut masih tinggi yaitu 8,15%. Seiring membaiknya situasi ekonomi, TPT kembali mengalami penurunan menjadi 6,39% di tahun 2022 dan 5,85% pada 2023. Perkembangan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi dan membaiknya iklim ketenagakerjaan di Kota Madiun. Secara keseluruhan,

fluktuasi TPT dalam periode ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik secara lokal maupun global.

Gambar 1.24 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Pasuruan

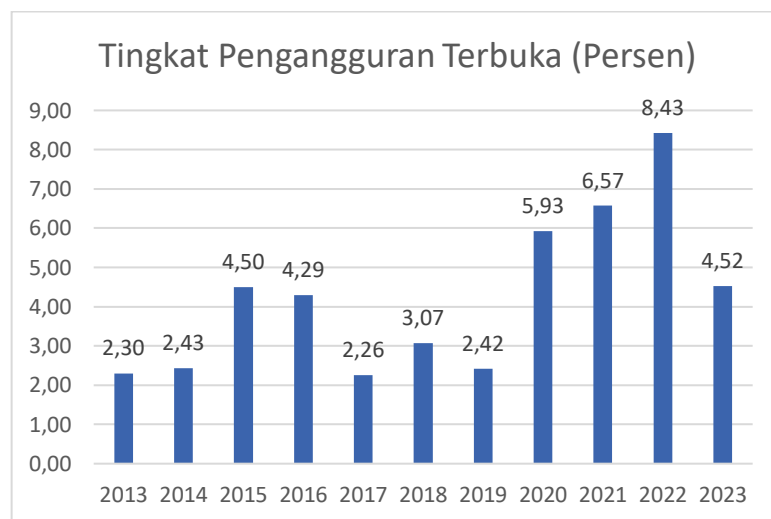


Sumber: BPS Kota Pasuruan (data diolah)

Grafik yang ditampilkan menggambarkan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pasuruan selama kurun waktu 2013 hingga 2023. Pada awal periode, yakni tahun 2013, angka pengangguran berada pada level 5,41% dan mengalami peningkatan menjadi 6,09% pada tahun berikutnya. Selanjutnya, angka tersebut sempat turun ke 5,57% pada tahun 2015. Tren penurunan yang lebih signifikan tercatat antara 2016 hingga 2018, saat TPT stabil di kisaran 4,50% hingga 4,64%. Namun demikian, mulai tahun 2019 terlihat adanya sedikit kenaikan menjadi 4,89%. Kenaikan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 memicu lonjakan TPT menjadi 6,33%. Meskipun terjadi penurunan ringan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 6,23% pada 2021 dan 6,18% pada 2022, angka tersebut

tetap menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Perbaikan baru tampak jelas pada 2023, ketika TPT menurun ke angka 5,64%, mencerminkan adanya pemulihan pada sektor ketenagakerjaan di Kota Pasuruan pasca pandemi.

Gambar 1.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Batu



Sumber: BPS Kota Batu (data diolah)

Grafik di atas memperlihatkan tren perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batu selama periode 2013 hingga 2023. Pada awal dekade, tingkat pengangguran terpantau cukup rendah, yakni sebesar 2,30% pada 2013 dan sedikit meningkat menjadi 2,43% pada 2014. Kenaikan yang lebih mencolok terjadi pada 2015 dan 2016, masing-masing mencapai 4,50% dan 4,29%. Namun, situasi membaik pada 2017 dengan penurunan tajam ke angka 2,26%, dan tetap berada pada level yang relatif rendah selama 2018 dan 2019, yakni berkisar antara 2,4% hingga 3,07%. Tahun 2020 menandai perubahan signifikan, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan pengangguran hingga mencapai 5,93%. Tren

peningkatan ini berlanjut dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan angka tertinggi sebesar 8,43%. Namun, pada tahun 2023, kondisi mulai membaik, ditunjukkan dengan penurunan TPT yang cukup tajam ke level 4,52%. Hal ini mengindikasikan adanya proses pemulihan di sektor ketenagakerjaan Kota Batu setelah terdampak pandemi. Dari latar belakang masalah serta merujuk pada literatur dan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu. Penulis mengangkat tema ini dalam skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu Tahun 2013 – 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu?
2. Apakah ada pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu?

3. Apakah ada pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu?
4. Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan beberapa tujuan yang ditujukan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu.
2. Untuk mengetahui ada pengaruh angka haraoan hidup terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu.
3. Untuk mengetahui ada pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu.
4. Untuk mengetahui ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mempunyai batasan masalah yang ditetapkan untuk menjaga fokus kajian tetap selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pembatasan ini bertujuan agar arah penelitian menjadi lebih jelas dan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat secara optimal. Adapun ruang lingkup penelitian difokuskan pada analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di lima kota di Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Batu selama periode 2013 hingga 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diupayakan bisa memberikan manfaat pada:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya untuk pengambilan kebijakan dalam pengentasan tingkat kemiskinan Di Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Dan Kota Batu.
2. Bagi Universitas dapat menambah acuan akademik dan koleksi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur dan perpustakaan pusat sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian dengan tema yang sama.
3. Sebagai sumber informasi bagi pihak yang dibutuhkan.